

PELATIHAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA (PERDES) BAGI PERANGKAT DESA DI DESA PASIRMULYA KECAMATAN BANJARAN, KABUPATEN BANDUNG

Riki Satia Muharam*, Budiman Rusli, Nina Karlina,
Candradewini, Dedi Sukarno

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

Correspondent Author Email*: r.satia.muhamaram@unpad.ac.id

Abstract

Village Regulations (Perdes) are ratified by the Village Head after a process of discussion and agreement with the Village Consultative Body (BPD) as a legal basis in the management of government and village development. The determination of the Perdes is the realization of village authority in accordance with higher regulations, ensuring that the Perdes are in line with regulations at the national level and do not harm the public interest. However, many village officials and communities do not have a sufficient understanding of this aspect of the law, which can affect the successful implementation of the Village Law and potentially cause legal conflicts. Training and assistance in the preparation of the Village Regulation aims to make village officials understand the standards for the preparation of village regulations, both from philosophical, sociological, and juridical aspects. The training method was carried out through Focus Group Discussion (FGD) and question and answer sessions, which allowed for in-depth discussions on the making of Perdes, village head regulations, and other relevant regulations. From this activity, village officials gain practical and theoretical knowledge and skills in village regulations, helping village officials prepare regulations that are effective and beneficial to the community.

Keywords: Perdes, Pasirmulya, Bandung Regency

Abstrak

Peraturan Desa (Perdes) disahkan oleh Kepala Desa setelah proses pembahasan dan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai landasan hukum dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Penetapan Perdes merupakan realisasi dari wewenang desa yang sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi, memastikan Perdes selaras dengan peraturan di tingkat nasional dan tidak merugikan kepentingan umum. Namun, banyak perangkat desa dan masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai aspek hukum ini, yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Desa dan berpotensi menimbulkan konflik hukum. Pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan Perdes bertujuan agar perangkat desa memahami standar penyusunan regulasi desa, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Metode pelatihan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan sesi tanya jawab, yang memungkinkan diskusi mendalam tentang pembuatan Perdes, peraturan kepala desa, dan regulasi lain yang relevan. Dari kegiatan ini, perangkat desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis maupun teoritis dalam peraturan desa, membantu perangkat desa menyusun regulasi yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata kunci: Perdes, Pasirmulya, Kabupaten Bandung

Copyright©2024. Riki Satia Muharam dan kawan-kawan.
This is an open access article under the CC-BY NC-SA license.
DOI: <https://doi.org/10.30656/mzf20t68>

PENDAHULUAN

Kajian-kajian mengenai Peraturan Desa sudah banyak dilakukan diantaranya: peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan peraturan desa (Arifin, A., 2018; Rachmawati, D., & Hermawan, S., 2021)), pelatihan penyusunan peraturan desa bagi perangkat desa (Setiawan, E., & Nugraha, Y., 2019; Santoso, P., & Irawan, T., 2022; Wijaya, K., & Putri, L., 2020), implementasi good governance dalam penyusunan peraturan desa (Putra, R., & Aditya, F., 2020).

Peraturan Desa (Perdes) adalah instrumen hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur hal-hal yang bersifat lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dasar hukum untuk Perdes di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi landasan bagi pembentukan dan pengaturan pemerintahan desa. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kewenangan desa dalam penyusunan Perdes. Tujuan utama penyusunan Perdes adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat, mendukung pembangunan desa, serta mewujudkan kemandirian desa.

Proses penyusunan Perdes melibatkan beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, musyawarah desa untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat, hingga pembahasan dan pengesahan oleh BPD. Perdes juga berperan penting dalam penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam desa. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman perangkat desa dan partisipasi masyarakat yang minim, rekomendasi untuk meningkatkan kualitas Perdes termasuk mengadakan pelatihan bagi perangkat desa dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang proses penyusunan dan peranannya, diharapkan Perdes dapat menjadi alat yang efektif dalam pengelolaan pemerintahan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Desa (Perdes) memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan dan pembangunan desa, karena Perdes menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat desa. Di Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, proses penyusunan Perdes seringkali menghadapi berbagai

tantangan, antara lain kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai regulasi dan tata cara penyusunan Perdes yang baik. Hal ini dapat berdampak pada kualitas Perdes yang dihasilkan, sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara optimal.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perdes juga masih terbatas. Banyak perangkat desa yang belum memahami pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penyusunan Perdes, mulai dari identifikasi masalah hingga sosialisasi Perdes yang telah ditetapkan. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan Perdes yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Seiring dengan peningkatan alokasi dana desa yang semakin besar, diperlukan juga peningkatan kapasitas perangkat desa dalam menyusun dan mengimplementasikan Perdes. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum, tujuan, proses penyusunan, serta teknik penulisan Perdes yang baik dan benar. Dengan demikian, diharapkan perangkat desa dapat menyusun Perdes yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat mengoptimalkan fungsi dan peran Perdes dalam pengembangan desa.

Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa, tetapi juga mendorong terbentuknya hubungan yang lebih baik antara perangkat desa dan masyarakat. Melalui pelatihan ini, diharapkan perangkat desa dapat lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik dan akuntabel. Dengan demikian, pelatihan dan penyusunan Perdes ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan Desa Pasirmulya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penyusunan Perdes yang efektif sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perdes menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan desa, termasuk di bidang pengelolaan sumber daya, pembangunan, dan pelayanan publik. Meskipun demikian, di beberapa desa, termasuk Desa Pasirmulya, pemahaman perangkat desa terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teknis penyusunan Perdes masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu,

pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan mengenai penyusunan Perdes yang baik dan benar, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat Desa Pasirmulya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelatihan ini terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi permasalahan dan kebutuhan perangkat desa terkait penyusunan Perdes. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Pasirmulya. Identifikasi kebutuhan pelatihan dan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) bagi perangkat desa di Desa Pasirmulya merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan konteks dan tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa. Salah satu kebutuhan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan pengetahuan hukum di kalangan perangkat desa, di mana banyak di antara perangkat desa yang belum memahami secara mendalam dasar hukum serta peraturan yang mengatur penyusunan Perdes. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam proses penyusunan Perdes, sehingga berdampak pada efektivitas dan legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa proses penyusunan Perdes di Desa Pasirmulya belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, yang mengarah pada kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan perlu difokuskan pada teknik-teknik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, tidak semua perangkat desa memiliki keterampilan menulis yang memadai untuk menyusun Perdes yang jelas dan terstruktur, sehingga pelatihan dalam aspek penulisan dan penyusunan dokumen hukum yang baik sangat dibutuhkan.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya, perangkat desa juga memerlukan pengetahuan untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pentingnya evaluasi dan monitoring setelah penyusunan Perdes juga menjadi perhatian, karena banyak perangkat desa yang kurang memahami bagaimana cara melaksanakan proses ini. Terakhir, tantangan dalam implementasi Perdes yang telah ada,

seperti kurangnya dukungan masyarakat dan keterbatasan sumber daya, juga perlu dibahas dalam pelatihan. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan pelatihan dapat memberikan solusi yang tepat dan meningkatkan kapasitas perangkat desa, sehingga menghasilkan Perdes yang berkualitas dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

2. Materi dan Penyampaian

Pelatihan dan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) bagi perangkat desa di Desa Pasirmulya dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam proses penyusunan Perdes yang berkualitas. Materi pelatihan meliputi pengantar mengenai definisi dan fungsi Perdes, serta dasar hukum yang mengatur pembuatan Perdes sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, peserta diajarkan tentang tahapan penyusunan Perdes, mulai dari identifikasi masalah hingga pengesahan, serta pentingnya pengumpulan aspirasi masyarakat agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pelatihan juga mencakup teknik penulisan dokumen hukum yang jelas dan terstruktur, serta format dan struktur Perdes yang baku untuk memudahkan pemahaman dan implementasi. Aspek evaluasi dan monitoring Perdes juga tidak kalah penting, di mana peserta diajarkan cara melakukan evaluasi pelaksanaan Perdes serta teknik untuk memantau implementasinya. Untuk memperdalam pemahaman, dilakukan studi kasus dan diskusi kelompok tentang masalah yang dihadapi dalam penyusunan dan implementasi Perdes.

Dalam penyampaian materi, metode presentasi yang digunakan bersifat interaktif (Gambar 1.), dengan pemanfaatan multimedia seperti slide dan video untuk menarik perhatian peserta. Narasumber berpengalaman diundang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hukum dan pemerintahan desa. Setiap sesi diakhiri dengan diskusi terbuka dan sesi tanya jawab, di mana peserta dapat berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi.

Praktik langsung melalui simulasi penyusunan Perdes dan *role play* dalam musyawarah desa turut dilaksanakan untuk memberikan pengalaman nyata. Umpan balik dari peserta dikumpulkan untuk mengevaluasi materi dan metode penyampaian, dan

disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan peserta dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk menyusun Perdes yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.



Gambar 1. Penyampaian Materi Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Bagi Perangkat Desa di Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

Materi pelatihan meliputi dasar hukum, struktur dan format Perdes, teknik penulisan peraturan, serta simulasi penyusunan Perdes. Pelatihan difasilitasi oleh akademisi dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan praktik langsung.

3. Praktik Penyusunan Perdes

Praktek penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dalam pelatihan ini menjadi tahap krusial untuk membekali perangkat desa Desa Pasirmulya dengan keterampilan praktis dalam merancang, menulis, dan menetapkan Perdes yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam sesi praktek ini, peserta berlatih menerapkan teori yang telah dipelajari dengan simulasi penyusunan Perdes berbasis masalah riil yang dihadapi oleh

masyarakat Desa Pasirmulya. Tahap pertama adalah Identifikasi Masalah Desa, di mana peserta mengumpulkan isu-isu utama di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga Perdes yang disusun akan relevan dan responsif.

Selanjutnya, dilakukan Simulasi Musyawarah Desa, yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat untuk memastikan Perdes mendapat dukungan publik. Peserta kemudian melanjutkan dengan Penyusunan Draft Perdes yang mencakup tujuan, ruang lingkup, ketentuan, dan sanksi yang dibutuhkan, serta disampaikan dalam bahasa hukum yang mudah dipahami. Draft ini di-review melalui Diskusi Kelompok dengan masukan dari peserta lain dan arahan dari fasilitator.

Setelah revisi, draft dianggap final dalam Pengesahan dan Simulasi Implementasi, di mana peserta mempraktikkan prosedur formal pengesahan Perdes oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Evaluasi Praktek Penyusunan Perdes menjadi langkah akhir, di mana peserta mendapat umpan balik dari fasilitator mengenai kesesuaian struktur, bahasa, dan keterkaitan dengan permasalahan desa. Dengan praktek ini, perangkat desa diharapkan dapat menyusun Perdes yang efektif, responsif, dan mendukung pengelolaan pemerintahan yang demokratis dan mandiri.

4. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring pelatihan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) bagi perangkat Desa Pasirmulya bertujuan untuk memastikan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman perangkat desa terhadap proses perancangan dan pelaksanaan Perdes. Evaluasi ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penilaian terhadap ketercapaian materi, efektivitas penyampaian, dan dampak pelatihan terhadap peningkatan kapasitas perangkat desa. Setiap sesi pelatihan diakhiri dengan kuesioner untuk mengukur pemahaman peserta serta feedback terhadap materi yang disampaikan. Peserta juga diberikan tes kemampuan awal dan akhir untuk mengevaluasi peningkatan kompetensi.

Monitoring dilakukan secara berkala setelah pelatihan selesai, di mana tim pendamping mengunjungi desa untuk menilai penerapan pengetahuan yang didapatkan selama pelatihan dalam proses penyusunan Perdes yang baru. Monitoring ini mencakup pengamatan langsung terhadap draft Perdes yang sedang disusun, serta wawancara

dengan perangkat desa untuk mengevaluasi keberlanjutan penerapan keterampilan yang telah dipelajari.

Dari hasil monitoring, ditemukan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan keterampilan teknis perangkat desa dalam merancang dan menulis Perdes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di sisi lain, hasil evaluasi juga menunjukkan kebutuhan terhadap pelatihan lanjutan, khususnya dalam hal penyusunan aspek-aspek spesifik Perdes dan teknik meningkatkan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, evaluasi dan monitoring menunjukkan bahwa pelatihan ini memberikan dampak positif bagi perangkat desa dalam memahami dan menyusun Perdes yang berkualitas. Tim pelatihan juga menyusun rencana tindak lanjut untuk memberikan pendampingan teknis berkelanjutan kepada perangkat desa, sehingga kompetensi yang diperoleh dapat terus ditingkatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung

Desa Pasirmulya terletak di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa ini memiliki karakteristik geografis yang menarik, dengan pemandangan alam yang asri dan lingkungan yang didominasi oleh lahan pertanian dan perbukitan. Lokasi Desa Pasirmulya yang strategis, tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Bandung, memberikan akses yang cukup baik bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial.

1. Demografi

Desa Pasirmulya dihuni oleh masyarakat yang beragam, dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Data demografi menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa ini berkisar antara beberapa ribu jiwa, dengan komposisi umur yang relatif beragam. Masyarakat Desa Pasirmulya dikenal kompak dan memiliki ikatan sosial yang kuat, yang tercermin dalam berbagai kegiatan bersama seperti gotong royong dan perayaan budaya.

2. Ekonomi

Perekonomian Desa Pasirmulya didominasi oleh sektor pertanian, di mana banyak warga desa yang bergantung pada hasil pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Komoditas pertanian yang umum ditanam meliputi sayuran, padi, dan buah-buahan. Selain pertanian, perdagangan lokal juga berkembang, dengan adanya pasar tradisional yang menjadi pusat interaksi ekonomi masyarakat. Selain itu, potensi wisata alam yang dimiliki desa juga mulai dijajaki sebagai sumber pendapatan tambahan.

3. Pendidikan

Di Desa Pasirmulya terdapat beberapa lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan, meskipun masih ada tantangan terkait aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui berbagai program pembelajaran dan pelatihan.

4. Infrastruktur

Infrastruktur di Desa Pasirmulya secara umum telah berkembang dengan baik, meskipun masih ada beberapa tantangan, terutama di wilayah yang lebih terpencil. Jalan akses menuju desa sudah teraspal, tetapi perbaikan dan pemeliharaan masih diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi. Selain itu, fasilitas umum seperti pos kesehatan desa, tempat ibadah, dan ruang terbuka publik juga ada, meskipun perlu ditingkatkan agar lebih memadai.

5. Budaya dan Kearifan Lokal

Masyarakat Desa Pasirmulya kaya akan tradisi dan budaya lokal yang masih dilestarikan, seperti upacara adat, seni pertunjukan, dan kebiasaan gotong royong. Budaya lokal ini menjadi salah satu identitas desa yang harus dijaga dan dilestarikan, serta dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk pengembangan pariwisata. Secara keseluruhan, Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung memiliki potensi yang besar dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, Desa Pasirmulya berpotensi untuk berkembang menjadi desa yang lebih mandiri dan sejahtera. Pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat desa, seperti yang diusulkan dalam program pelatihan penyusunan Perdes, sangat penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Bagi Perangkat Desa di Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung

Pelatihan dan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) bagi perangkat desa di Desa Pasirmulya dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam menyusun Perdes yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari kegiatan tersebut:

1. Hasil Pelatihan

Pelatihan ini melibatkan semua perangkat desa, termasuk Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan staf administratif desa. Beberapa hasil yang diperoleh dari pelatihan ini antara lain:

- Peningkatan Pemahaman Hukum: Para peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang dasar hukum Perdes, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur desa dan proses penyusunan Perdes. Peserta juga lebih memahami pentingnya Perdes dalam konteks pengelolaan dan pembangunan desa.
- Keterampilan Penyusunan Perdes: Peserta dilatih untuk menyusun draft Perdes dengan mengikuti struktur dan format yang benar. Peserta berhasil membuat beberapa rancangan Perdes yang mencakup topik-topik penting seperti pengelolaan sumber daya alam, tata kelola lingkungan, dan pelayanan publik.
- Partisipasi Masyarakat: Selama pelatihan, peserta dibekali dengan teknik untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Perdes. Hal ini mendorong perangkat desa untuk lebih aktif dalam melakukan musyawarah desa dan mengumpulkan aspirasi masyarakat.
- Simulasi Penyusunan Perdes: Peserta melakukan simulasi penyusunan Perdes secara langsung. Dalam sesi ini, mereka belajar tentang tahapan mulai dari identifikasi masalah hingga sosialisasi Perdes kepada masyarakat. Hasil dari simulasi ini adalah beberapa draft Perdes yang siap untuk dibahas lebih lanjut.

2. Pembahasan

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan Perdes sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik. Beberapa poin yang dapat dibahas lebih lanjut adalah:

- Kualitas Perdes yang Dihasilkan: Dengan pemahaman dan keterampilan yang meningkat, diharapkan Perdes yang disusun dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.
- Pentingnya Keterlibatan Masyarakat: Salah satu faktor kunci dalam penyusunan Perdes yang efektif adalah keterlibatan masyarakat. Pelatihan ini memberikan penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa.
- Sustainability Program: Meskipun pelatihan telah memberikan dampak positif, penting untuk merancang program tindak lanjut guna memastikan bahwa perangkat desa terus mendapatkan dukungan dan bimbingan. Hal ini dapat berupa pelatihan lanjutan, mentoring, atau forum diskusi berkala untuk membahas tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perdes.
- Penerapan dan Evaluasi Perdes: Setelah Perdes disusun, perlu dilakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat agar mereka memahami isi dan tujuan dari Perdes tersebut. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi Perdes juga penting untuk memastikan bahwa Perdes dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pelatihan dan penyusunan Peraturan Desa di Desa Pasirmulya berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam menyusun Perdes yang berkualitas. Hasil pelatihan menunjukkan potensi besar untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik dan partisipatif. Namun, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk terus mendukung proses ini agar Perdes yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Indikator keberhasilan Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes)

Indikator keberhasilan pelatihan Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Bagi Perangkat Desa di Desa Pasirmulya dapat dirumuskan dalam dua aspek utama: hasil pelatihan dan pembahasan yang tercapai selama kegiatan pelatihan. Berikut penjelasan untuk masing-masing aspek:

1. **Indikator keberhasilan berdasarkan hasil pelatihan.** Keberhasilan dapat diukur dari beberapa parameter berikut:

Pemahaman Peserta:

- Peserta pelatihan mampu menjelaskan konsep dasar peraturan desa (Perdes), tujuan penyusunan Perdes, dan regulasi yang menjadi rujukan hukum (UU Desa).
- Peserta memahami prosedur administrasi dan mekanisme formal dalam penyusunan Perdes.

Peningkatan Kompetensi Teknis:

- Peserta mampu menyusun draft Perdes yang sesuai dengan kebutuhan spesifik desa.
- Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan di desa untuk diintegrasikan ke dalam Perdes.

Hasil Nyata:

- Draft Perdes yang sudah dirancang sesuai kebutuhan Desa Pasirmulya.
- Tersedianya dokumen referensi berupa modul atau panduan penyusunan Perdes untuk perangkat desa.

2. **Indikator Keberhasilan Berdasarkan Proses Pembahasan.** Beberapa indikator keberhasilan pembahasan meliputi:

Partisipasi Aktif Peserta:

- Peserta aktif memberikan ide, masukan, dan diskusi selama proses pelatihan.
- Adanya kolaborasi antara perangkat desa dan fasilitator dalam merumuskan masalah dan solusi terkait Perdes.

Keterlibatan Stakeholder:

- Adanya partisipasi dari masyarakat atau pihak lain (BPD, tokoh masyarakat) dalam pembahasan awal atau konsultasi publik terkait Perdes.

Kejelasan Materi dan Pelaksanaan:

- Materi pelatihan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami.
- Fasilitator mampu memberikan contoh praktis penyusunan Perdes yang relevan dengan kondisi Desa Pasirmulya.

Rencana Tindak Lanjut (RTL):

- Terdapat jadwal atau timeline yang jelas untuk finalisasi Perdes yang telah disusun.
- Adanya komitmen perangkat desa untuk mengesahkan Perdes melalui mekanisme yang sesuai.

3. Indikator Tambahan (Outcome Jangka Panjang):

- Perdes yang disusun diterapkan secara efektif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa Pasirmulya.
- Terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penyelesaian masalah yang diatur dalam Perdes tersebut.
- Desa Pasirmulya menjadi model atau contoh bagi desa lain dalam penyusunan Perdes yang berbasis kebutuhan lokal.

Indikator keberhasilan ini perlu dievaluasi melalui survei kepuasan peserta atau pengamatan langsung terhadap perubahan yang terjadi di tingkat desa.

KESIMPULAN

Pelatihan penyusunan Perdes bagi perangkat Desa Pasirmulya berhasil meningkatkan kapasitas mereka dalam penyusunan kebijakan desa yang tepat sasaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan desa serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan desa. Diperlukan keberlanjutan pelatihan serta bimbingan reguler dari pihak akademisi atau pemerintah kabupaten untuk memastikan perangkat desa tetap mendapatkan pembaruan terkait aturan terbaru dan implementasi Perdes secara efektif.

Daftar Pustaka

- Arifin, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa melalui Pelatihan dan Pendampingan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 75-82.
- Setiawan, E., & Nugraha, Y. (2019). Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa bagi Perangkat Desa di Kabupaten Karawang. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 3(1), 45-53.
- Putra, R., & Aditya, F. (2020). Implementasi Good Governance dalam Penyusunan Peraturan Desa: Studi Kasus di Desa X Kabupaten Y. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 2(3), 30-37.

- Rachmawati, D., & Hermawan, S. (2021). Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 4(1), 12-20.
- Santoso, P., & Irawan, T. (2022). Pendampingan dan Pelatihan dalam Penyusunan Perdes di Kabupaten Tana Tidung: Sebuah Upaya Good Governance. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7(1), 33-39.
- Suhardjo, M. (2017). *Manajemen Pemerintahan Desa: Prinsip dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, K., & Putri, L. (2020). Pendampingan dalam Penyusunan Peraturan Desa sebagai Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5(4), 89-96.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Buku Panduan Penyusunan Peraturan Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2020)